

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan negara berkembang pada saat ini, Indonesia sedang menata perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, pada proses meningkatkan perekonomian masyarakatnya pemerintah pusat sedang melaksanakan programnya dalam mengembangkan tempat-tempat wisata yang sangat berpotensi menguntungkan bila tidak dimanfaatkan untuk menambah pemasukan devisa negara. Pariwisata dalam proses pembangunan ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia terutama dalam kegiatan bersosial dan kegiatan ekonominya.

Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menanggulangi kemiskinan melalui kebutuhan dasar pembangunan saran dan prasaran di kampung masyarakat. Pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, bahwa pembangunan harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996 hlm. 51), manusia adalah subjek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditunjukkan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Menurut Sunyoto Usman (2008, hlm. 56) (dalam Sabtimarlia, 2015, hlm. 4) menyimpulkan bahwa pembangunan wisata berbasis masyarakat adalah dimana masyarakat atau warga setempat memainkan peran penting dan utama dalam

pengambilan keputusan mempengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan mereka.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia, penciptaan peluang usaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Undang - Undang (22/99) Tentang Otonomi Daerah diberlakukan mulai tahun 2009. Dalam undang – undang tersebut pembangunan dan pengembangan akan lebih difokuskan pada daerah pedesaan, sehingga dengan demikian akan terjadi perubahan sosial kemasyarakatan dari urbanisasi ke ruralisasi (orang-orang kota senang/akan pergi ke desa untuk berekreasi).

Kampung Wisata merupakan kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik tertentu yang kemudian berpotensi dikembangkan untuk menarik pengunjung. Karakteristik kampung tersebut diolah dan dikemas lebih menarik guna menjadi tujuan wisata. Seperti di Kabupaten Tasikmalaya terdapat sebuah Kampung Wisata yang memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai daya tarik Wisatawan untuk berkunjung ke Kampung Wisata. Dengan adanya Kampung Wisata masyarakat menjadi lebih produktif dan dapat berpartisipasi secara langsung, untuk terlibat dalam empat tahap partisipasi yaitu : tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, tahap pengambilan manfaat, dan tahap evaluasi. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa dalam penataan ruang atau pembangunan terdapat 3 (tiga) tahap yang perlu dilakukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Oleh karena itu, perencanaan adalah tahap awal yang harus dimiliki karena memiliki posisi penting dalam mengendalikan harkat dan derajat hidup manusia. Dalam melakukan pembangunan di desa maupun kampung yaitu untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kabupaten Tasikmalaya Di Provinsi Jawa Barat bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara 7°02' 29" - 7°49' 08" Lintang Selatan serta 107°54' 10" - 108°25' 52" Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, DOB Kab Pangandaran
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut.

Sementara untuk luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya secara keseluruhan adalah 2.708,82 km², dengan panjang garis pantai sekitar 54,5 km dan luas daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) sebesar 306 km². Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 Kecamatan yang terdiri dari 351 desa. Tiga kecamatan mempunyai wilayah pesisir dan lautan dengan luas total 200,72 km² atau 7,41 persen dari luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya (tasikmalayakab.go.id). Dengan keadaan Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai banyak gunung dan juga memiliki dataran rendah menjadikan Tasikmalaya memiliki banyak destinasi wisata dari mulai pegunungan, pantai, wisata pemandian air panas serta wisata alam lainnya. Sehingga banyak wisatawan dalam maupun luar yang menjadikan Tasikmalaya sebagai salah satu tujuan berwisata.

Selain wisata alam Tasikmalaya mempunyai objek wisata buatan dan objek wisata budaya, salah satunya objek wisata budaya yang masih belum banyak dikenal oleh masyarakat luas adalah Kampung Wisata di Kampung Legokawi. Jarak Kampung Wisata Legokawi dari pusat kota adalah 46 km dengan menggunakan kendaraan roda 2. Budaya atau ciri khas suatu wilayah untuk melestarikan diperlukan suatu wadah untuk dijadikan patokan. Kampung Wisata Legokawi juga sudah mendapatkan kejuaraan Kampung Iklim, karena Kampung

Legokawi pada tahun 2019 sudah mulai tertata dari mulai pembenahan paradigma dan Sumber Daya Manusianya. Budaya atau ciri khas suatu wilayah harus dilestarikan dan untuk melestarikan diperlukan suatu kreativitas yang

menampung dan menjadi edukasi yang akan dijadikan patokan. Tetapi dalam pembangunan Kampung Wisata ini tidak terlepas dengan yang namanya hambatan. Hambatan dalam pembangunan disini, kurangnya pencahayaan seperti listrik dan akses internet, sehingga dalam suatu perencanaan pembangunan masyarakat tidak sering mengandalkan informasi – informasi dari Agen Pembaharu atau wisatawan yang berkunjung, dan untuk kurangnya pencahayaan seperti listrik di Kampung Legokawi sehingga kegiatan wisata di luar ruangan hanya dilakukan di siang hari saja. Kampung Legokawi sendiri sudah mulai berkembang sehingga sudah hampir dikenal banyak orang bahkan banyak sekali orang dari luar kota. Kampung Wisata Edukasi ini merupakan salah satu bentuk perencanaan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat khususnya petani. Bentuk dari Kampung Wisata Edukasi ini adalah pembangunan model kampung yang dijadikan obek wisata lengkap, sehingga menguntungkan bagi para petani maupun masyarakat sekitar karena memungkinkan dalam bentuk fasilitasnya.

Program Kampung Wisata Edukasi merupakan salah satu bentuk perencanaan dan pembangunan masyarakat petani dalam rangka meningkatkan pendapatannya melalui program Kampung Wisata Edukasi yang mendukung Kampung Legokawi merupakan Kampung yang memiliki kawasan pertanian sekaligus sebagai kawasan wisata berbasis alam yang mendukung. Salah satu unggulannya, yaitu Kampung Wisata Edukasi yang dapat melestarikan budaya khas Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu masyarakat lokal yang kreatif membuat tempat pojok taman baca menjadikan nilai lebih dalam rangka menerapkan literasi.

Disetiap Kampung Wisata memiliki nilai daya tarik tersendiri untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Daya tarik tersebut memerlukan pengelohan dalam pembangunan secara berkala dan berkelanjutan, karena dari hal sederhana tersebut masyarakat dapat mengambil manfaat dan mempertimbangkan potensi, serangkaian aktivitas masyarakat melalui pembangunan Kampung Wisata, maka saya tertarik melakukan sebuah penelitian mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perintisan Kampung Wisata Edukasi (Studi

Kampung Legokawi Desa Cukangjayaguna Kecamatan Sodong Hilir Kabupaten Tasikmalaya)”).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi untuk wisata tetapi masih banyak tempat wisata yang belum menjadi tujuan wisata untuk para wisatawan seperti Kampung Wisata Edukasi di Legokawi.
2. Terdapat alam yang memiliki potensial tinggi seperti Kebun Teh, Produk dari Bahan Baku Pisang dan Gula Aren yang bisa dijadikan ciri khas Kampung Wisata tetapi belum dikenal oleh masyarakat luas seperti Kampung Wisata Edukasi Berbasis Ekologi.
3. Pemanfaatan Kampung Wisata belum dilaksanakan secara maksimal.
4. Peran Agen Pembaharu dalam pemberdayaan masyarakat melalui perintisan Kampung Wisata Edukasi

1.3. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dijelaskan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian adalah :

Bagaimana proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perintisan Kampung Wisata Edukasi Berbasis Ekologi (Kampung Legokawi Desa Cukangjayaguna Kecamatan Sodong Hilir Kabupaten Tasikmalaya)?

1.4. Tujuan Penelitian

Dari uraian yang sudah ada di bagian rumusan masalah, maka tujuan yang diambil dalam penelitian ini adalah :

Mendeskripsikan proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perintisan Kampung Wisata Edukasi Berbasis Ekologi (Kampung Legokawi Desa Cukangjayaguna Kecamatan Sodong Hilir Kabupaten Tasikmalaya).

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah atau memperluas ilmu pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan desa wisata yang ada di Kampung Wisata Legokawi berbasis ekologi.
- b. Berkontribusi atau memberikan sumbangan pemikiran kepada akademisi maupun praktisi masyarakat yang peduli dalam menggali potensi dan pemberdayaan lokal.

1.5.2. Kegunaan Praktisi

- a. Bagi masyarakat Kampung Wisata, dengan adanya praktisi dapat mengetahui partisipasi dapat dilakukan oleh masyarakat demi pengembangan Kampung Wisata di Legokawi.
- b. Pengelola Sumber Daya Alam, dapat dikembangkan menjadi Kampung Wisata dengan memanfaatkan potensi yang ada dilingkungan masyarakat untuk menjadi daya tarik wisatawan dan menjadi edukasi sehingga dapat memberikan pesan moral untuk menjaga lingkungan dan bisa menjadi ciri khas Kampung Wisata Edukasi.
- c. Pemerintah Desa dan pariwisata, dapat mengetahui kreativitas lokal yang harus dikembangkan agar terkenal ke masyarakat luas.
- d. Praktisi pemberdayaan masyarakat, dapat mengetahui kegiatan pemberdayaan di Kampung Wisata Legokawi khususnya dalam pengembangan Kampung Wisata.
- e. Bagi peneliti atau Akademisi Pendidikan Masyarakat, sebagai salah satu syarat untuk menyandang gelar sarjana satu (S1) dan bertambahnya ilmu pengetahuan mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Kampung Wisata.

1.6. Definisi Operasional

1.6.1. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Chamber (1995) (dalam Munawar, 2011), pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable*. Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic mental*) masyarakat tetapi lebih sebagai mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek:

1. *Enabling*, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya.
2. *Empowering*, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
3. *Protecting*, melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pembudayaan dan pengalaman demokrasi (Friedman, 1994) (dalam Munawar, 2011 hlm. 95).

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam perintisan kampung wisata edukasi ini sangat memberdayakan masyarakat seperti potensi yang melimpah sehingga masyarakat dapat berkembang dalam hal meningkatkan kreativitas dan kualitas masyarakat di Kampung Legokawi. Kampung Legokawi pun menjadi tertata dengan adanya pemberdayaan masyarakat, melindungi dan meningkatkan perekonomiannya melalui kampung wisata. Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam hal meningkatkan taraf hidupnya, pemberdayaan masyarakat

melalui kampung wisata disini pun tidak terlepas dari budaya – budaya mereka, maka dengan adanya kampung wisata edukasi berbasis ekologi berharap budaya – budaya mereka dapat dilestarikan dan dikenalkan kepada wisatawan yang berkunjung.

Subejo dan Narimo (2004, hlm. 75) mengemukakan bahwa, terminologi pemberdayaan masyarakat kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*community development*), yaitu proses dimana usaha-usaha orang-orang itu sendiri disatukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan kultural masyarakat, menyatukan masyarakat-masyarakat itu ke dalam kehidupan bangsa, dan memungkinkan masyarakat itu menyumbangkan secara penuh bagi kemajuan nasional.

1.6.2. Peran Agen Pembaharu dalam Pembangunan Berbasis Pemberdayaan

Menurut Averroes (2009) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*community development*). Karena praktiknya saling tumpang tindih. Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep di bangun dari kerangka logik sebagai berikut:

1. Proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi.
2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran.
3. Kekuasaan akan membangun atas atau sistem pengetahuan sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi.
4. Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tundaya.

Agen pembaharu memang menjadi hal yang paling utama dalam membangun atau merintiskan sesuatu dalam pemberdayaan, maka dalam Perintisan Kampung Wisata Edukasi Berbasis Ekologi di Kampung Legokawi adanya agen pembaharu guna membantu dalam proses pemutusan kekuasaan pembangunan karena agen pembaharu dapat melakukan perubahan sosial dan mempunyai suatu ide inovasi yang berencana, sehingga dalam perintisan kampung wisata ini berjalan sesuai dengan apa yang di rencanakan, menjadi lebih terarah.

Agen pembaharu juga selain menjadi seseorang yang mempunyai ide, agen pembaharu bertugas menjadi mata rantai, dalam perintisan kampung wisata ini sangat diperlukan komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun pemerintah daerah. Agen pembaharu harus menerima saran dan masukan dari masyarakat lokal atau masyarakat yang dibinanya, agar dalam perintisan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan bersama. Maka, di dalam perintisan kampung wisata edukasi berbasis ekologi agen pembaharu dengan masyarakat sangat berperan aktif dan saling menghargai dalam penyampaian pendapat dan informasi sehingga dalam perintisannya sangat baik dan cepat.

Alur pikir diatas sejalan dengan terminologi pemberdayaan itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah *empowerment* yang berawal dari kata daya (*power*). Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Ia merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan. Keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidak seimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber power. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya power dis powerment, yakni peniadaan power pada sebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki power. Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan.

Menurut Havelock (dalam Nasution & Zulkarimen, 2004, hlm.56) mengemukakan Agen Pembaharu dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat ialah seseorang yang melakukan perubahan sosial atau yang mempunyai suatu ide inovasi yang berencana. Menurut Ibrahim, 1988:100 (dalam Setyoningrum, n.d.) yang disebut Agen Pembaharu (*agent of change*) ialah orang yang bertugas untuk mempengaruhi klien agar dapat menerima inovasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pengusaha pembaharu. Hal ini sesuai dengan yang di ungkap oleh (Rogers & Everett, 1983, hlm. 313) bahwa berbagai macam pekerjaan seperti: guru, konsultan, penyuluh kesehatan, penyuluh keluarga berencana, penyuluh pertanian dan sebagainya mereka yang dapat disebut dengan Agen Pembaharu.

Maka Agen Pembaharu dalam Pembangunan Masyarakat sangat saling melengkapi karena saling berproses sehingga adanya perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma – norma. Soetomo (2009, hlm. 166) mengungkapkan bahwa pembangunan masyarakat yaitu proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik dan tertata, sehingga adanya peningkatan taraf hidup masyarakat sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui proses pembangunan masyarakat.

Rogers dan Shoemaker (dalam Nasution & Zulkarimen, 2004, hlm. 129) mengemukakan bahwa Agen Pembaharu berfungsi sebagai mata rantai dimana adanya komunikasi antar dua (atau lebih) sistem sosial, sehingga dapat menghubungkan antara suatu sistem sosial masyarakat yang dibinanya dalam usaha perubahan inovasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari peranan utama seorang Agen Pembaharu adalah:

1. Sebagai katalisator, menggerakkan masyarakat untuk mau melakukan perubahan dan inovasi.
2. Sebagai pemberi pemecahan persoalan.
3. Sebagai penghubung (*linker*) dengan berbagai sumber–sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
4. Sebagai pembantu proses perubahan; membantu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi, serta memberi petunjuk mengenai

bagaimana:

- a. Mengenali dan merumuskan kebutuhan
- b. Mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan
- c. Mendapatkan sumber-sumber yang relevan
- d. Memilih dan menciptakan pemecahan masalah, dan
- e. Menyesuaikan dan merencanakan tahapan pemecahan masalah

1.6.3. Perencanaan dalam Perintisan Kampung Wisata Edukasi

Perencanaan wisata adalah proses yang sangat kompleks dalam mempertimbangkan berbagai aspek serta segmen dari pariwisata. Perencanaan yang tepat yaitu yang ketika Agen Pembaharu dapat mengenai fisik, hukum, promosi, keuangan, pasar ekonomi, manajemen, sosial dan aspek lingkungan yang akan membantu mengembangkan pariwisata dengan cara yang menguntungkan masyarakat sekitar. Menurut D. Getz (1987) (Wardiyanto & Baiquni, 2011, hlm.83) mendefinisikan perencanaan pariwisata sebagai: “Sebuah Proses, yang di dasarkan dengan penelitian dan evaluasi, dengan tujuan agar bisa mengoptimalkan potensi kontribusi pariwisata untuk kesejahteraan manusia dan kualitas lingkungan sekitar”.

Perencanaan pada dasarnya ialah penetapan alternatif, dimana dapat menentukan bidang – bidang dan langkah – langkah perencanaan yang akan diambil dari berbagai kemungkinan bidang dan langkah yang ada. Bidang dan langkah yang diambil ini tentu saja sangat dipandang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sumber daya yang tersedia dan mempunyai resiko yang sekecil – kecilnya. Oleh sebab itu maka, dalam penentuannya timbul berbagai bentuk perencanaan yang alternatif sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut, antara lain :

1. *Dari segi jangka waktu*, perencanaan dapat dibedakan: (a) perencanaan jangka pendek (1 tahun), dan (b) perencanaan jangka panjang (lebih 1 tahun).
2. *Dari segi luas lingkupnya*, perencanaan dapat dibedakan: (a) perencanaan nasional (umumnya untuk mengejar keterbelakangan suatu bangsa dalam berbagai bidang), (b) perencanaan regional (untuk menggali potensi suatu wilayah dan mengembangkan kehidupan masyarakat wilayah itu), dan (c)

perencanaan lokal, misalnya: perencanaan kota (untuk mengatur pertumbuhan kota, menertibkan penggunaan tempat dan memperindah corak kota) dan perencanaan desa (untuk menggali potensi suatu desa serta mengembangkan masyarakat desa tersebut).

3. *Dari segi bidang kerja yang dicakup*, dapat dikemukakan anatar lain: industrialisasi, agrarian (pertanahan), pendidikan, kesehatan, pertanian, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya.
4. *Dari segi tata jenjang organisasi dan tingkat kedudukan manajer*, perencanaan dapat dibedakan: (a) perencanaan haluan *policy planning*, (b) perencanaan program (*program planning*), dan (c) perencanaan langkah opencanaan program (*program planning*), dan (c) perencanaan langkah *operational planning*.

Perencanaan dalam pemberdayaan masyarakat dan perintisan sangat berperan penting karena menentukan bagaimana tujuan dan hasil akhir dari pemberdayaan. Seperti di Kampung Legokawi, masyarakat sangat berperan penuh dalam perencanaan dan agen pemberharu sangat membantu dari melihat aspek lingkungan hingga promosinya, sehingga dapat membantu mengembangkan ide – ide dan membantu kreativitas masyarakat yang terpendam. Kampung wisata ini juga sangat rutin adanya evaluasi agar masyarakat dapat mengoptimalkan potensi alam dan kontribusi masyarakat untuk kesejahteraan dan kualitas lingkungan.

1.6.4. Ekologi

Secara harafiah ekologi yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya atau dengan kata lain mempelajari hubungan timbal – balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi hanya bersifat eksploratif dengan tidak melakukan percobaan, jadi hanya memanfaatkan dan mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di alam.

Pada saat ini dengan adanya berbagai keperluan dan kepentingan, ekologi digunakan untuk berkembangnya ilmu dan tidak hanya mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di alam. Ekologi berkembang menjadi ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi ekosistem (alam), sehingga dapat menganalisis dan memberi jawaban terhadap berbagai kejadian alam.

Menurut Zoer'aini (2003) (dalam Utomo et al., n.d.), seseorang yang belajar ilmu ekologi sebenarnya mempertanyakan berbagai hal antara lain adalah:

1. Bagaimana alam bekerja.
2. Bagaimana species beradaptasi dalam habitatnya.
3. Apa yang diperlukan organisme dari habitatnya untuk melangsungkan kehidupan.
4. Bagaimana organisme mencukupi kebutuhan materi dan energi.
5. Bagaimana interaksi antar spesies dalam lingkungan.
6. Bagaimana individu - individu dalam spesies diatur dan berfungsi sebagai populasi.
7. Bagaimana keindahan ekosistem tercipta.

Dari perpaduan harafiah dan berbagai kajian, maka ekologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Manusia sebagai makhluk hidup juga menjadi pembahasan dalam kajian ekologi. Ekologi menjadi jembatan antara ilmu alam dengan ilmu sosial.

Maka, pemberdayaan masyarakat Kampung Wisata Edukasi Legokawi Berbasis Ekologi karena ingin mengembangkan potensi lokal yang melimpah di Kampung Legokawi, dan meningkatkan kualitas masyarakatnya agar dapat memanfaatkan potensi lokal tersebut sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya. Potensi lokal atau ekologi dalam pemberdayaan masyarakat ini juga masyarakat dapat menjaga hingga melestarikan lingkungan dan budaya mereka, memperkenalkan budaya – budaya masyarakat lokal yang masih terjaga kepada wisatawan yang berkunjung.